

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) OLEH DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BIMA
(Studi Kasus Kecamatan Raba)**

*The Effectiveness Of Management Of Non Cash Food Assistance (BPNT) By
The Social Services In Improving Community Welfare In Bima City
(Case Study Of Raba District)*

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



Oleh :

DITA RIZKY ANINDY PUTRI
NIM. 217110089

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) OLEH DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BIMA (STUDY KASUS di
KECAMATAN RABA)**

Oleh:

DITA RIZKY ANINDY PUTRI

NIM : 217110089

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 14 Agustus 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Mintasrihardi, M.H.
NIDN.0830016101

Pembimbing II



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN.0802048904

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Administrasi Publik




Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) OLEH DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BIMA (STUDY KASUS di
KECAMATAN RABA)**

Oleh:

DITA RIZKY ANINDY PUTRI

NIM. 217110089

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Mintasrihardi, M.H.**
NIDN.0830016101

Ketua

2. **Iskandar, S.Sos., M.A.**
NIDN.0802048904

Anggota

3. **Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP**
NIDN: 0822048901

Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP
NIDN: 0822048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

NAMA : DITA RIZKY ANINDY PUTRI

NIM : 217110089

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima (Study Kasus Kecamatan Raba)* merupakan hasil karya sendiri. Dalam skripsi sendiri tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 25 September 2021

Yang membuat pernyataan



DITA RIZKY ANINDY PUTRI

NIM : 217110089



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DITA ROKY ANINDY PUTRI
 NIM : 217110089
 Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 08 SEPTEMBER 1999
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 No. Hp/Email : 087826 090 154
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
 OLEH DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
 DI KOTA BIMA (STUDY KASUS KELAWATAN KABA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 SEPTEMBER 2021
 Penulis


 DITA ROKY ANINDY PUTRI
 NIM. 217110089

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos.M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

*Sukses Bukanlah Akhir, Kegagalan Tidak Fatal, Yang Terpenting Adalah
Keberanian Untuk Melanjutkan*



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga dapat mempersembahkan karya ini sebagai wujud terimakasih kepada :

1. Kepada diri saya sendiri yang sudah berhasil di titik ini dalam susah maupun senang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan serta doanya kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
3. Kepada dosen-dosen saya yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman dan kerabat-kerabat saya yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
5. Kepada pacar saya tercinta, orang yang special, yang tersayang terimakasih sudah mau sabar, mau membantu dan ikut serta didalamnya, tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat disetiap saatnya.
6. Dan yang terakhir untuk Almamater hijauku dan Kampus Hijauku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘’ Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima (Study Kasus Kecamatan Raba)’’. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata-1 di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Mintasrihardi, M.H. selaku dosen pembimbing I saya yang telah membimbing dan memberikan berbagai macam saran dan kritik, di Universitas Muhammadiyah Mataram.

5. Bapak Iskandar, S.Sos., M.A sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua peneliti yang selalu memberikan Doa dan motivasi serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Sahabat-sahabatku tercinta dan Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dan semua pihak yang telah memberikan masukan dorongan serta semangat motivasi bagi peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi doa dan dukungan hingga dapat terselesainya proposal ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah disusun dalam proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dan pembaca pihak lain yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan bagi Almamater tercinta.

Mataram, 14 Agustus 2021

Dita Rizky Anindy Putri

Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima (Studi Kasus Di Kecamatan Raba)

Dita Rizky Anindy Putri¹, Mintasrihardi², Iskandar³
Mahasiswa¹, Pembimbing², Pembimbing Utama³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Bima. Penelitian ini menggunakan Teori Sutrisno dalam Silvi Farikhatul Jannah (2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Raba Kota Bima belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari: (1) Pemahaman masyarakat mengenai program BPNT dapat dikatakan baik; (2) Ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT masih kurang tepat dikarenakan pembaharuan data masyarakat miskin yang belum efisien; (3) Ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan; (4) Tujuan dari program BPNT telah terlaksana dengan baik dilihat dari kurangnya beban pengeluaran dan membantu memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (5) Perubahan nyata yang dialami oleh penerima BPNT telah dirasakan cukup baik karena penerima bantuan telah merasakan manfaat dari adanya program ini.

Kata Kunci : Efektivitas, Kesejahteraan, Program BPNT

The Effectiveness of Non-Cash Food Assistance (BPNT) Management by the Social Service in Improving Community Welfare in Bima City (Case Study in Raba District)

Dita Rizky Anindy Putri¹ Mintasrihardi² Iskandar³
Student¹, Supervisor², Principal Advisor³

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Biringkanaya District, Bima City. This study employs the Sutrisno's theory in Silvi Farikhatul Jannah (2007). A qualitative research method was applied in this study. The interview, observation, and documentation methods were conducted to obtain data. The findings revealed that the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program of Raba Sub-district, Bima City was ineffective, this could be seen from: (1) Public understanding of the BPNT program can be categorized in good, (2) The accuracy of the target recipients of the BPNT program assistance is still inaccurate due to the inefficient updating of data on the poor, (3) The transfer timeliness of BPNT program funding to KPM remains poor due to frequent delays in the distribution of help, (4) The BPNT program's objectives have been well implemented, as evidenced by the lack of expenditure burden and the ability to assist Beneficiary Families (KPM) in meeting their food needs, (5) The real changes experienced by BPNT recipients have been well felt because the beneficiaries got the benefits of this program.

Keywords: *Effectiveness, Welfare, BPNT Program*

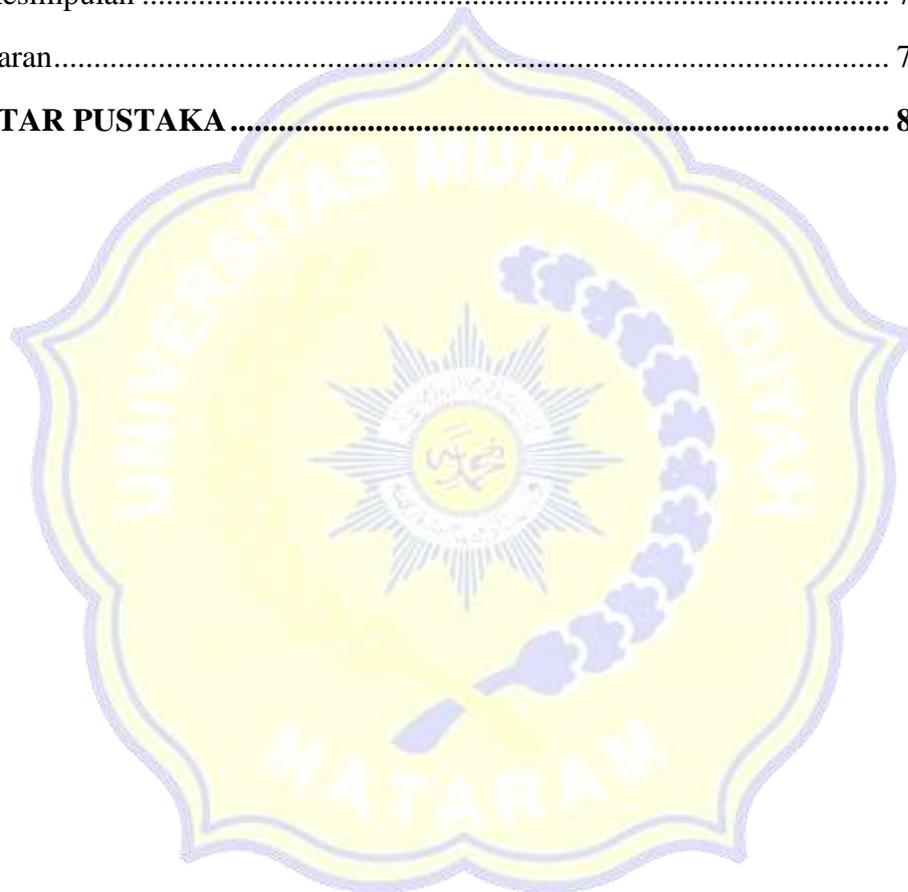


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Akademik	6
1.4.2 Manfaat Lembaga	6
1.4.3 Manfaat Penulis	6
1.4.4 Manfaat Pembaca	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Devinisi Efektivitas	12
2.2.1.1 Ukuran Efektivitas	16
2.2.2 Kesejahteraan	19
2.2.2.1 Teori Kesejahteraan	19
2.2.2.2 Indikator kesejahteraan.....	22

2.2.2.3 Tujuan Kesejahteraan	24
2.2.2.4 Fungsi Kesejahteraan Masyarakat	25
2.2.2.5 Penyelenggaraan Kesejahteraan	26
2.2.3 BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).....	28
2.2.3.1 Definisi BPNT	28
2.2.3.2 Dasar Hukum BPNT.....	29
2.2.3.3 Mekanisme Penyaluran BPNT	30
2.2.3.4 Evaluasi Penyaluran BPNT	32
2.3 Kerangka Berpikir.....	33
2.4 Teori Konseptual Dan Operational	35
2.4.1 Definisi Konseptual	35
2.4.2 Definisi Operasional	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian	37
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
3.4 Fokus Penelitian	39
3.5 Teknik Penentuan Informan	39
3.5.1 Kriteria Informan	39
3.5.1.1 Informan Kunci Peneliti.....	39
3.5.1.2 Informan Utama	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Teknik Observasi (Pengamatan)	41
3.6.2 Wawancara.....	42
3.6.3 Dokumentasi	43
3.7 Sumber Data.....	44
3.7.1 Data Primer.....	44
3.7.2 Data Sekunder	45
3.8 Teknik Analisis Data.....	45
3.8.1 Reduksi Data	45
3.8.2 Penyajian Data	45
3.8.3 Penarikan Kesimpulan	45
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Profil Kantor Dinas Sosial Kota Bima	48
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Bima	49
4.1.3 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Bima.....	50
4.1.4 Peta Wilayah Kota Bima Dan Kecamatan Raba	51
4.1.5 Deskripsi Bidang Fakir Miskin (PFM)) Di Kota Bima	54

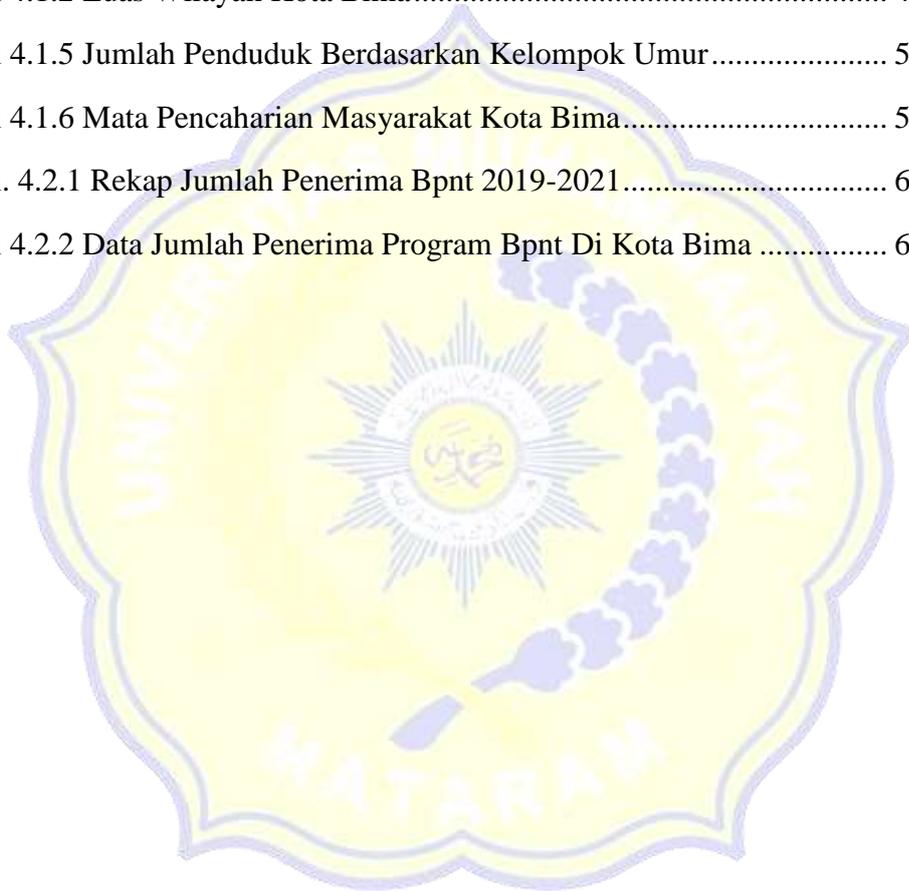
4.2 Pembahasan.....	56
4.2.1 Efektivitas Dinas Sosial Dalam Menjalankan Program BPNT	57
4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Program BPNT	70
4.2.2.1 Faktor Penghambat	70
4.2.2.2 Faktor Pendukung	75
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Devinisi Operasional.....	42
Tabel 4.1.1 Batas-batas wilayah	46
Tabel 4.1.2 Luas Wilayah Kota Bima.....	47
Tabel 4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	53
Tabel 4.1.6 Mata Pencaharian Masyarakat Kota Bima.....	53
Tabel. 4.2.1 Rekap Jumlah Penerima Bpnt 2019-2021.....	65
Tabel 4.2.2 Data Jumlah Penerima Program Bpnt Di Kota Bima	69



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bima	49
Gambar 4.1.4 Peta Wilayah Kota Bima Dan Kecamatan	52
Gambar 4.1.7 Kartu E-Warong	59



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi di Kantor Dinas Sosial	84
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan mengeluarkan program-program sosial yaitu salah satunya dengan meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peran pemerintah sangat diperlukan, dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang dirumuskan dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai acuan. (Rahma, 2020:2)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan yang disalurkan dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk nontunai dengan tarif bulanan sebesar Rp 110.000/KPM melalui media elektronik. mekanisme rekening Tempatkan dimana Bank Himpunan Bank Nasional (Himbara) bekerjasama untuk membeli makanan sangat dibutuhkan, yang kemudian disebut

e-warong. Rencana tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat, dan memberikan gizi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. (Anisa Rahma Dini, dkk 2020:2)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bentuk bantuan sosial pangan non tunai yang diberikan oleh pemerintah yang hanya digunakan untuk pembelian pangan dari pedagang pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank melalui mekanisme rekening elektronik setiap bulan. Implementasi rencana BPNT pada tahun 2017 dianggap sebagai pilot project, jika implementasinya efektif dan sekaligus dilakukan upaya untuk mengubah kebijakan dari model subsidi (Rastra) menjadi model bantuan pangan nasional, akan menjadi diperluas pada tahun berikutnya (BPNT). Tujuan sebenarnya dari rencana BPNT adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memenuhi kebutuhan pangan, memberikan KPM gizi yang lebih seimbang, meningkatkan tujuan dan waktu KPM untuk memperoleh bantuan pangan, dan memberikan KPM lebih banyak pilihan dan kontrol untuk memenuhi kebutuhan pangan, sehingga mengurangi beban pengeluaran KPM. Kebutuhan dan dorongan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Benny Rachman, dkk 2019:2).

Selama pelaksanaan proyek BPNT yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, masih ada persoalan lain yang masih ditentukan, seperti penetapan besaran. Dari segi kuantitas bantuan pangan non tunai yang diberikan melalui kartu kombo

(Kartu Keluarga Sejahtera) sudah sesuai, namun terdapat beberapa permasalahan pada sistem penyaluran melalui e-warung yaitu kurangnya pemahaman tentang bantuan pangan. Masyarakat menggunakan atau mengunjungi e-warung. Sementara itu, dari sisi administrasi, program bantuan pangan nontunai (BPNT) mengalami kendala dalam sistem distribusi melalui kartu keluarga sejahtera. (Ana Rosalina & Susi Hardjati, 2019:98).

Peluncuran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bima dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tanggal 29 November 2018 yang dihadiri oleh Menteri Sosial. Terdapat 89.393 sasaran penerima bantuan sosial sejahtera. Setelah peluncuran BPNT, maka penerima beras Raskin atau Rastra tidak akan menerima bantuan berupa beras melainkan akan menerima uang tunai Rp110 ribu per bulan. Untuk menunjang penyaluran bantuan tersebut, Dinas Sosial menyiapkan 12 E-warung yang wajib dimanfaatkan oleh penerima BPNT untuk membeli telur dan beras subsidi. Selain itu, bantuan bisa juga dicairkan melalui agen-agen Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang telah tersedia di setiap kecamatan. (Berita11.com, diakses pada 1 November 2018).

Kota Bima khususnya Kecamatan Raba merupakan lokasi tersalurnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari lima kecamatan yang ada di Kota Bima. Kecamatan Raba merupakan kawasan padat penduduk dengan jumlah terbanyak di Kota Bima. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani/peternak. Sedangkan dilihat dari segi pendidikan kebanyakan warganya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak

sedikit pula putus sekolah hingga menambah jumlah pengangguran . (kehaba.net diakses pada 1 Desember 2020).

Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin (PFM) mengadakan peluncuran program BPNT di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada Kamis (29/11/2018). Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah harus di rasakan oleh penerima program penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non-PHK. Program ini bertujuan agar taraf hidup keluarga di indonesia khususnya di Kota Bima makin meningkat. Melalui pemberian bantuan sosial ini generasi penerus bangsa diharapkan mendapatkan gizi yang seimbang. (iNews.id diakses pada 29 November 2020)

Kecamatan raba merupakan salah satu kecamatan dari lima kecamatan di Kota Bima yang menjalankan program BPNT yang diadakan oleh pemerintah. Dengan adanya dukungan langsung dari semua pihak diharapkan pelaksanaan program ini diharapkan berjalan dengan lancar dan efektif. Dalam pelaksanaan program ini diharapkan tidak ada lagi kasus untuk rumah tangga miskin (Raskin) maupun program beras sejahtera (Rastra).(iNews.id diakses pada 29 November 2020).

Kepala dinas sosial Kota Bima menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini sudah berjalan dengan lancar. Kelancaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini tentunya dibantu oleh Dinas Sosial serta di awasi langsung oleh petugas pada setiap Kecamatan. Kota bima siap mendukung program walikota dan wakil walikota terutama pada bidang sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Bima mengatakan, sesuai data dinas setempat penerima BPNT di

Kota Bima sebanyak 8.293 rumah tangga sasaran (RTS). Masih sama dengan jumlah penerima program beras masyarakat sejahtera (Rastra). (sosial.bimakota.go.id, diakses pada 05 Juni 2019)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti memilih judul **“Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima (Studi Kasus Di Kecamatan Raba)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas pemerintahan Kota Bima dalam pengelolaan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Raba ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Raba ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas yang diterapkan oleh pemerintah kota bima dalam menjalankan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima.

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemerintahan Kota Bima dalam pengelolaan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Raba.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Raba.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Bagi Akademis

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan kampus sehingga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan Efektifitas pemerintah dalam menjalankan program bantuan yang disalurkan ke masyarakat yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbandingan dari produk pendidikan Universitas, dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggung jawab.

1.4.3 Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dalam hal mendapatkan pengetahuan tentang Jalannya program Bantuan Pangan Non Tunai yang dijalankan oleh pemerintah.

1.4.4 Bagi Pembaca

Yaitu sebagai contoh, masukan serta pertimbangan yang nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi teman-teman mahasiswa dalam membuat paper maupun makalah di tahun berikutnya yang berkaitan dengan program Bantuan dan Pemberdayaan Masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.

Saat menulis karya ilmiah ini, penulis memeriksa dan menggali informasi yang diberikan oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan pembandingan, termasuk kelemahan atau kelebihan yang ada. Selain itu, penulis juga menggali informasi dari beberapa buku serta makalah dan makalah untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan judul-judul yang dijadikan landasan teori ilmiah.

Kajian terdahulu yang pertama adalah jurnal Eko Yudianto Yunus yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ukuran dan tujuan kebijakan gagal memenuhi standar, tujuan, dan sasaran kebijakan, maka akan terjadi banyak penjelasan. Hal ini sangat penting, karena tanpa kerja sama para pelaksana kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Keberhasilan atau kegagalan rencana ini ditentukan oleh pemerintah lingkungan, karena rencana ini dilaksanakan di setiap Kelurahan. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Aspar, Sakaruddin M, Syakhrudin Dn yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pada pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berjalan cukup baik di Kelurahan Bontoduri. Kehadiran

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rosaliana, A. & Hardjati, S yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional *e-warong* dari pemerintah ke pengelola *e-warong*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodelogi	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Eko Yudianto Yunus, 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Deskriptif Kualitatif	Ukuran dan Tujuan Kebijakan Apabila standar, tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai akan terjadi multi interpretasi dan sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari	Persamaannya terletak pada program yang dilihat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

			<p>aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini juga yang menentukan sukses tidaknya adalah pemerintah kelurahan, karena program ini diterapkan di setiap kelurahan.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya pada tempat dan waktu. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu fokus penelitian. Dimana peneliti melihat fokus efektivitas program BPNT sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implementasinya.</p>
2	<p>Aspar, Sakaruddin M, Syakhrudin Dn, 2020. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pada pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berjalan cukup baik di Kelurahan Bontoduri. Kehadiran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini sama-sama melihat sejauhmana program BNPT yang dilakuka oleh pemerintah dalam meningkatkan</p>

	Makassar		langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu.	kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yaitu membahas implementasi dan efektivitas.
3.	Rosaliana, A. & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan pangan dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-	Persamaannya terletak pada efektivitas pelaksanaan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak Pada lokasi penelitian tersebut.

			warong dari pemerintah ke pengelola e-warong.	
--	--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Eektivitas

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005), efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa adanya yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa juga menjelaskan arti efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu dengan sesuatu dengan tujuan yang ingin dicapai. (Gumelar Ardiansyah, 2020: 284)

Istilah efektivitas merupakan kata yang tidak asing yang sering muncul dalam kajian ilmu Administrasi Negara. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Ada banyak pengertian dari kata efektivitas, banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian dari efektivitas: Kurniawan dalam Rosalina (2012:3) Transformasi

Pelayanan Publik menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. (Pabundu, 2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Mahsun (2006:180) menyatakan efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Kemudian, Mahsun (2006:182) menjelaskan bahwa efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kebijakan operational dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

Menurut pendapat Mahmudi dalam Dean (2012:11) “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas

merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu kegiatan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sehubungan dengan hal di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya (Dean, 2012:11).

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan

yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain (Farida, 2017:43).

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010 : 133), mengemukakan pendapat bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu :

a. Optimalisasi tujuan.

Dengan mengoptimalkan target, beberapa target dapat diidentifikasi, meskipun tampaknya saling bertentangan. Dalam hal optimasi tujuan, efektivitas dievaluasi berdasarkan sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak, dan tujuan ini terkait satu sama lain.

b. Perspektif system

Dengan sistem terbuka, perhatian lebih diarahkan pada masalah keterkaitan, struktur, dan saling ketergantungan. Sistem terdiri dari 3 komponen utama yaitu input, output dan proses. Sebagai sebuah sistem, organisasi menerima input dari lingkungannya, memprosesnya, dan kemudian memberikan output ke lingkungannya. Tidak ada input dari lingkungan, kemudian diproses, dan kemudian output diberikan ke lingkungan. Tanpa input dari lingkungan, tidak akan ada output dari lingkungan, dan sebuah organisasi akan mati dengan sendirinya.

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Perilaku manusia dalam organisasi digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu

menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Karena factor manusia itulah suatu organisasi dapat efektivitas atau biasa menjadi tidak efektif.

2.2.1.1 Ukuran Efektivitas

Berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada dapat digunakan untuk mengukur efektivitas. Ukuran efektivitas menjadi tolak ukur untuk menganalisis kegiatan atau rencana yang telah dilaksanakan. Bisa dilihat dari berbagai sudut, tergantung siapa yang menilai dan menafsirkannya. (Danim, 2004: 119-120).

Menurut penjelasan Sutrisno dalam Silvi Farikhatul Jannah (2007: 125-126), ukuran efektivitas rencana organisasi adalah:

a. Pemahaman program

Dalam hal ini, pemahaman tentang rencana tersebut mungkin terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang rencana kegiatan oleh kelompok kepentingan atau pemegang saham dan tingkat sosialisasi e-warong.

b. Tujuan yang tepat

Tujuan yang benar mengacu pada penerapan tujuan yang direncanakan dan tujuan yang ditetapkan. Proyek yang telah dilaksanakan harus memiliki tujuan tertentu agar proses pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan efektif.

c. Tepat waktu

Ini adalah periode waktu program dijalankan di bawah kondisi yang ditentukan. Dalam pengelolaan bangsal elektronik, melalui proses penerbitan bangsal elektronik dan bansos harus dapat diterbitkan pada waktu yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif tidaknya rencana tersebut.

d. Tercapainya tujuan

Pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian tujuan yang dicapai dengan pelatihan proyek atau kegiatan lain yang mendukung terwujudnya proyek.

e. Perubahan nyata

Hal ini dapat diukur dengan menerapkan kegiatan e-warong untuk memberikan masyarakat dengan efek aktual atau tingkat pengaruh dan perubahan.

Menurut Prihartono (2012:37), efektivitas diartikan sebagai derajat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Tujuan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Dan efisiensi adalah rasio terbaik dari input terhadap output, atau sering disebut dengan rasio input terhadap output. Ada beberapa cara untuk mengukur efektivitas, yaitu:

a. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Organisasi dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkan dan memelihara system organisasi dalam kondisi mampu dan sumber daya yang diperoleh dari lingkungan.

a. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Hal ini merupakan efektivitas organisasi sebagai efisiensi dan kondisi dari organisasi secara internal.

b. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pengukuran sasaran menjadi sukit kaena ada bermacam-macam sasaran, antara lain operative goal dan sasaran resmi. Juga bermacam-macam output yang dihasilkan.

c. Pendekatan Gabungan

Pendekatan kontingensi mengadakan pengukuran efektivitas secara menyeluruh, yaitu :

- 1) Oleh kelompok birokrat organisasi
- 2) Oleh kelompok karyawan
- 3) Oleh kelompok saham
- 4) Oleh kelompok bahan dan peralatan
- 5) Oleh kelompok pemilik atau owner

Menurut Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Pencapaian Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2.2 Kesejahteraan

2.2.2.1 Teori Kesejahteraan

Berdasarkan asal kata, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung arti pengertian dari bahasa Sanskerta “*cetera*” yang artinya “payung”. Asal kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “*cetera*” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupu batin. (Fahrudin, 2012:10).

Menurut Lokshin dan Ravallion (2000:281), kesejahteraan dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif dapat menggambarkan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain : lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, tingkat independensi, semangat hidup, dan *leisure*. Milligan *et al* (2006:22) menjelaskan bahwa kesejahteraan objektif adalah tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat yang diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu, baik ukuran, ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Sementara itu, suandi (2006:7) mengatakan bahwa kesejahteraan subjektif merupakan tingkat kesejahteraan seseorang individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam bentuk kepuasan dan kebahagiaan. (Fahrudin, 2012:59).

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Hasimi, 2020:15). Sehingga disini kita dapat melihat tujuan diselenggarakan kesejahteraan

sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan

Menurut (Suharto, 2014:53) kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan Lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama) yaitu suatu keadaan yang terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, Pendidikan dan perawatan kesehatan (Edi, 2014:33). Menurut (Asriyah, 2007:45), Kesejahteraan terdiri dari dua macam diantaranya:

1. Kesejahteraan perorangan

Kesejahteraan pribadi identik dengan tingkat kepuasan kebutuhan warga yang bersangkutan. Selama pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung pada faktor ekonomi, kesejahteraan pribadi selalu merupakan "utilitas" positif dan keseimbangan "utilitas" dan "utilitas", termasuk kesenangan warga, semuanya langka. Komoditas pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusia. "Utilitas" negatif meliputi biaya untuk memperoleh barang (misalnya, waktu luang yang terbuang percuma), dan dampak negatif dari perilaku sipil lainnya (misalnya, dampak negatif terhadap lingkungan), di mana kesejahteraan pribadi.

2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dari beberapa individu atau kesejahteraan Bersama. Adapun yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan guna penyelesaian permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan karena tanpa adanya sumber penyelesaian masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat

menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan diselesaikan dengan cepat.

c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat demokratis.

Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan didalamnya.

d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

2.2.2.2 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat obyektif , sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan (Natalia, 2016:9).

Menurut (Sukmawati, 2018:7) Tahapan dan indikator Keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Tahapan

- a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KSI) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”(basic needs). tahapan Keluarga Sejahtera I.
- b. Tahapan Keluarga Sejahtera I yaitu yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan”(*developmental needs*) dari keluarga.
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I. 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.

- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5(lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

2. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

- a. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai lantai dan dinding yang baik
- 4) Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

- b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Indikator ini tidak berlaku untuk anggota keluarga

vegetarian. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun

- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah
- 4) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- 5) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
- 6) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bias baca tulisan latin, indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun
- 7) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

c. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan”, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama ialah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- 3) Kebiasaan keluarga makan Bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/tv/ internet
- d. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” dari 21 indikator keluarga, yaitu:
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan social
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/Yayasan/institusi masyarakat

2.2.2.3 Penyelenggaraan Kesejahteraan

Menurut (Notowidagdo, 2016:110-115) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu:

- 1) Rehabilitas
 - a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosialnya secara wajar.
 - b. Upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi, dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksebilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut atau rujukan.
- 2) Jaminan Sosial
 - a. Jaminan sosial dalam bentuk asuransi untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat

mental, cacat fisik dan mental, penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- b. Jaminan dalam bentuk tunjangan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

3) Pemberdayaan Sosial

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulant modal usaha, dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan peran serta individu, Lembaga, dan sumber daya dalam penyelenggaraan sosial yang dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan, dan penggalangan dana serta pemberian stimulant. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi sumber data, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan bantuan usaha.

4) Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dilakukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial tersebut dilaksanakan melalui bantuan sosial dan bantuan hukum.

2.2.3 BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

2.2.3.1 Devinisi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Pada tanggal 26 April 2016 dalam rapat terbatas tentang keuangan inklusif Presiden Joko Widodo memberikan arahan jika bantuan sosial subsidi disalurkan secara non tunai, arahan ini sesuai dengan Perpes No.82 Tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan jika strategi pengelolaan keuangan dan hubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut telah berjalan melalui penyaluran bantuan sosial secara nontunai yang diharapkan dapat meningkatkan keefektifitasan dan ketepatan sasaran serta mendorong keuangan inklusif, salah satunya melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Wiwit, dkk 2020:4)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana kondisi sosial ekonominya berada 25% terendah di daerah pelaksana. Dalam rangka meningkatkan keefektifitasan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar lebih dimudahkan dalam pengontrolan, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Program ini merupakan kebijakan dari Kementerian Sosial yang berpedoman pada

Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. (Wiwit, dkk 2020:5)

BPNT ini setiap bulannya disalurkan dengan system transfer kepada KPM sebesar Rp.110,000,- melalui mekanisme uang elektronik yang ada dalam KKS dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan atau beras yang bisa dicairkan di E-warong atau agen yang telah bekerjasama dengan bank penyalur, bantuan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang ataupun komoditi lain tetapi bantuan tersebut dapat digunakan kapanpun sesuai kebutuhan KPM dan akan terakumulasi secara otomatis pada e-wallet apabila KPM memiliki saldo sisa dan jumlah tersebut tidak akan hangus bila tidak digunakan pada bulan sebelumnya. (Wiwit, dkk 2020:5)

2.2.3.2 Dasar Hukum BPNT

- a. Dikeluarkannya satu kebijakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat tentunya memiliki landasan yang dijadikan dasar pengaturan dalam berjalannya kebijakan tersebut, adapun landasan atau dasar hukum dari kebijakan pemerintah terkait program Bantuan Pangan Non Tunai ini, ialah: Peraturan Presiden RI nomr 63 tahun 2017, terkait penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
- b. Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2016 terkait stategi nasional inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 254/ PMK.05/2015 terkait belanja bantuan sosial pada kementrian negara/lembaga.

- d. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 228/PMK.05/2016 terkait perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 254/pmk05.2015 mengenai Belanja bantuan sosial pada Kementrian /Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2017 terkait program Keluarga Harapan.
- f. Arahan Presiden RI pada 26 Maret 2017, 16 April 2017, dan 19 Juli 2017 dalam forum Rapat terbatas tentang pengalihan bantuan dan subsidi dilakukan secara non tunai. (Tim Pengendali BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, 2017:4)

2.2.3.3 Mekanisme Penyaluran Program BPNT

a. Tahap persiapan program

Tahap persiapan merupakan proses paling awal dari pendistribusian BPNT setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT. Dalam tahap persiapan program BPNT maka dilaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan, kordinasi ini meliputi koordinasi di tingkat pemerintah pusat, di tingkat pemerintah provinsi dan di tingkat pemerintah kota / kabupaten Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat juga melibatkan bank penyalur bantuan pangan dengan bentuk kegiatan pembukaan rekening penerima bantuan sosial, memastikan jumlah dan sebaran e-warong, serta kesepakatan proses penyaluran yang melibatkan Bank Penyaluran.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam penyelenggaraan suatu program baru maka perlu adanya kegiatan pengenalan serta pengetahuan mengenai seluk beluk dari suatu program

maka dilaksanakannya program edukasi dan sosialisasi program BPNT sebagai langkah awal untuk mengenalkan BPNT kepada pihak-pihak terkait. Sasaran dari kegiatan edukasi dan sosialisasi program BPNT meliputi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah termasuk juga tim koordinasi Bansos pangan pada tingkat daerah, organisasi perangkat desa pada tingkat kecamatan, pendamping program BPNT, KPM (Keluarga Penerima Manfaat), pengelola usaha mikro (e-warung), serta bank penyalur bantuan. Adapun materi dari kegiatan edukasi dan sosialisasi program BPNT meliputi, kebijakan program BPNT, prinsip-prinsip BPNT, tata cara dan fungsi rekening bantuan sosial, manfaat BPNT, tata cara pelaporan masalah dalam BPNT, serta tujuan dan mekanisme BPNT.

c. Registrasi dan pembukaan rekening penerima kartu KKS

Pada proses registrasi dan pembukaan kartu KKS ini melalui 3 proses yakni, proses pertama, Bank penyalur bantuan melakukan registrasi secara kolektif berdasarkan data yang diberikan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DT-PPFM. proses kedua, Bank Penyaluran melakukan distribusi kartu kombo (KKS) yang telah dibukakan rekeningnya oleh Bank. Penyalur Rakyat yang mencakup buku tabungan, kartu kombo (KKS), dan petunjuk penggunaan kartu, serta proses ketiga yakni, Bank Penyalur melakukan laporan dengan format baku antar bank dan dashboard program BPNT kepada pihak Kementerian Sosial dan Tim Pengendali.

d. Penyaluran

Dalam proses penyaluran BPNT akan melalui beberapa tahap yakni :

- 1) Bank penyaluran membukakan masing-masing akun elektronik untuk KPM berdasarkan daftar KPM yang diterima dari kementerian sosial.
- 2) Bank penyalur bantuan melakukan pemindahan dana bantuan dari rekening kementerian sosial kepada rekening Keluarga Penerima Bantuan.
- 3) Pemberian pemerintah oleh Kementerian sosial kepada Bendahara Umum Negara/Daerah yang digunakan sebagai dasar pencairan BPNT, kemudian Bendahara Umum Negara/ Daerah melakukan pencairan dana yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial di Bank Penyalur BPNT.
- 4) Bank penyalur menginformasikan kepada kepada pemerintah daerah terkait dana bantuan yang telah di transfer kepada KPM program BPNT. (Tim Pengendali BPNT, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, 2017:21-42)

2.2.3.4 Evaluasi Program BPNT

Keberhasilan dalam pembangunan yang dilaksanakan sebuah negara termasuk Indonesia dapat dilihat melalui kondisi kesejahteraan masyarakatnya, dimana kondisi kemiskinan menjadi indikator yang valid untuk dalam menilai suatu pembangunan atau program. Kemiskinan yang dialami seseorang bisa juga dikatakan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan berbagai program dimana salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai peningkatan

kesejahteraan masyarakat agar bisa menanggulangi kemiskinan. Meningkatnya angka jumlah penduduk miskin atau belum dapatnya ditanggulangi seluruh penduduk miskin melalui program bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu kurang efektifnya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sehingga belum atau tidak tercapainya sasaran yang diinginkan. Hasilnya, penduduk miskin belum bisa diatasi dengan cepat dan bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi ini nantinya akan dapat diketahui kendala-kendala serta hambatan-hambatan apa saja yang terjadi sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai alat informasi untuk melakukan perbaikan. (Wiwit, dkk 2020:7)

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini kerangka berpikir yang akan dibahas oleh penulis Efektifitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk masyarakat. Dimana indikator-indikatornya terdiri dari:

1. Efektivitas Pemerintah :

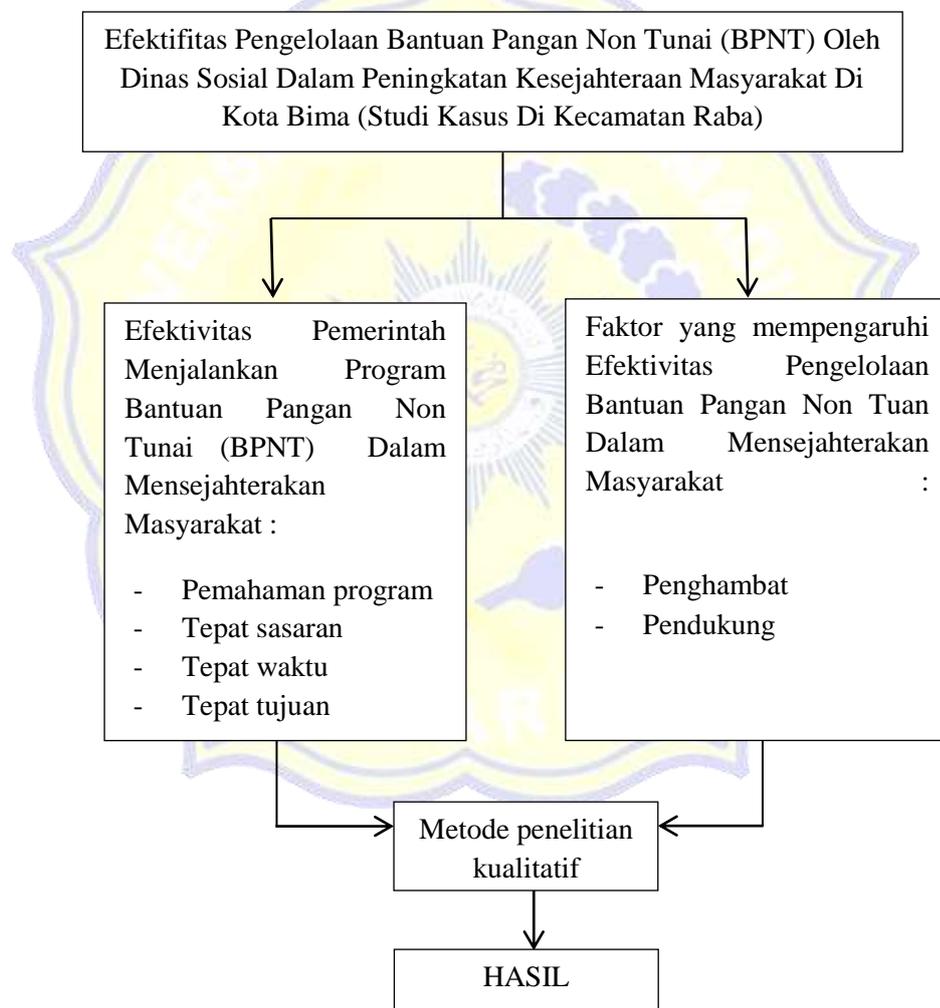
- a. Pemanahan program
- b. Tepat sasaran
- c. Tepat waktu
- d. Tepat tujuan

1. Faktor yang mempengaruhi :

- a. Rehabilitasi sosial
- b. Jaminan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Perlindungan sosial

Bagan 2.1.

Kerangka Berpikir



2.4 Teori Konseptual dan Operasional

2.4.1 Definisi Konseptual

1. Efektivitas

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005), efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan. Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa adanya yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa juga menjelaskan arti efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu dengan sesuatu dengan tujuan yang ingin dicapai (Gumelar Ardiansyah, 2020:28).

Efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali

sumber-sumber, meningkatkan,dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu penentuan sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel sehingga seorang peneliti dapat mengetahui variabel yang akan diteliti.

Tabel 2.2.

Definisi Operional

<p>Efektivitas Pemerintah Menjalankan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mensejahterakan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemahaman program2) Tepat sasaran3) Tepat waktu4) Tepat tujuan	<p>Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tuan Dalam Mensejahterakan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penghambat2) Pendukung
---	---

Sumber: Diolah oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data mengenai data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan: (Sugiyoni, 2005:166)

Penelitian kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Penelitian ini akan menggambarkan kondisi alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Bantuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima khususnya pada Kecamatan Raba.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pengertian pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah

terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. (Lexy J. Moleong, 2008:14)

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Raba Kota Bima. Pengambilan lokasi ini dilakukan karena Kecamatan Raba adalah salah satu wilayah yang melaksanakan program BPNT dari pemerintah daerah dimana program ini berjalan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Kota Bima khususnya di Kecamatan Raba. Waktu penelitian disesuaikan oleh peneliti, karena peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sampai dimana saya mendapatkan titik kepuasan sampai situlah saya berhenti meneliti.

3.4 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. sesuai dengan judul yang peneliti angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Efektifitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima (Studi Kasus Di Kecamatan Raba).

3.5 Teknik Penentuan Informan

3.5.1 Kriteria Informan

3.5.1.1 Informan Kunci Penelitian

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. (Ade Heryana, 2014:4)

Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci (Ade Heryana, 2014:5) :

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi
2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti
3. Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapan pun saat dibutuhkan
4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural).
Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.

3.5.1.2 Informan utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci (Ade Heryana, 2014:6)

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu teknik *snowball sampling*. Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:12),

informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek peneliti. Adapun subjek peneliti yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang PFM Dinas Sosial
2. Ketua Koordinator Daerah BPNT
3. TKSK BPNT Kecamatan Raba
4. Pendamping KPM Kecamatan Raba
5. KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

3.6.1 Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72). Menurut Hadari Nawawi (2005:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis

yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk di uji kebenarannya berdasarkan observasi yang seobyektif mungkin (Nasution, 2009 : 110).

Di sini peneliti menggunakan observasi terang-terangan dan tersamar, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang di teliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih di rahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan secara terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi. Adapun data yang diperoleh peneliti dalam melakukan teknik observasi lapangan adalah pakta-pakta yang terjadi di lapangan di mana peneliti ikut terlibat di dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber dan melakukan pengamatan sehingga peneliti bisa mengumpulkan fakta-fakta yang akan di jadikan data yang valid. (Susan Stainback dalam Sugiyono, 2014:145)

3.6.2 Wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dengan tujuan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang di teliti. Esterberg dalam Sugiyono (2014:137), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Staniback dalam Sugiyono (2014:42) mengemukakan bahwa jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Data yang diperoleh dalam teknik wawancara berupa informasi-informasi yang diberikan oleh narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti baik secara mendalam maupun yang mendasar berdasarkan permasalahan yang diteliti. Sehingga peneliti dapat bertukar informasi dengan narasumber, tentunya peneliti akan membawa alat bantu untuk mendokumentasikan hasil wawancara seperti tape recorder, gambar, file, berkas dan lainnya.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:82) dokumentasi adalah cara dengan menggunakan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian pengumpulan dengan cara mengutip dari dokumen-dokumen yang sudah jadi baik berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, peraturan kebijakan, gambar, sejarah lain sebagainya, yang berkaitan dengan obyek dan keperluan penelitian.

Data yang diperoleh dalam kegiatan dokumentasi adalah arsip-arsip kebijakan yang sudah diimplementasikan sehingga bisa menjadi pembanding data yang diperoleh baik dari observasi maupun dari wawancara, data yang diperoleh dari dokumentasi diperlukan untuk menambah data yang masih kurang, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Peneliti melakukan dokumentasi berupa surat-surat atau laporan-laporan tertulis serta mengambil foto-foto dari realita yang ada di lapangan.

3.7 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder (Dalam Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2005) :

3.7.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau strategi penyerapan aspirasi perempuan. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin melakukan wawancara dengan seluruh masyarakat, maka peneliti mengambil strategi untuk mewawancarai Kepala Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Ketua PKH, Ketua KPM dan Masyarakat yang menerima bantuan. (Ridwan, 2008:69)

3.7.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari instansi. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, lampiran-lampiran, hasil survey, penggunaan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah di kumpulkan melalui pengamatan dan data wawancara. (Ridwan, 2008:69)

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiyono, 2013 :243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.